



ANTARA FOTO/HARVIYAN PERDANA PUTRA

KERAJINAN MINIATUR TRUK: Perajin miniatur memproduksi kerajinan truk di Aden Miniatur Production, Sukomangli, Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kemarin. Menurut perajin, produksi miniatur truk berbahan limbah kayu dan pipa PVC itu dijual Rp150 ribu-Rp20 juta per unit dan dipasarkan online dan marketplace.

Pelemahan Daya Beli Jadi Momok di 2023

Pada 2023, pelaku usaha diperkirakan akan menghadapi kenaikan biaya pinjaman, imbas dari kenaikan suku bunga acuan berbagai bank sentral di dunia.

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com

EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan perlu diwaspadainya pelemahan daya beli masyarakat pada 2023. Pada tahun yang diprediksi bakal terjadi resesi global itu, para pelaku usaha akan menaikkan harga produknya seiring dengan naiknya harga bahan baku.

"Beberapa industri akan

menaikkan harga karena nilai tukar rupiah sudah menyentuh 15.000 per dolar Amerika Serikat, sementara asumsi mereka ada di 14.600 per dolar AS," katanya dalam Dialog Pakar 'Peran APBN dalam Pemulihan Ekonomi' di Jakarta, kemarin.

Ja memaparkan, depresiasi nilai tukar rupiah dan inflasi di Tiongkok telah meningkatkan harga bahan baku industri. Meski demikian, daya beli masyarakat diperkirakan dapat tetap terjaga dengan pendistribusian bantuan lang-

sung tunai (BLT).

Tantangan lainnya di 2023, sambung Aviliani, ialah kenaikan biaya pinjaman bagi pelaku usaha. Hal itu sebagai dampak dari kenaikan suku bunga acuan berbagai bank sentral di dunia yang tengah berupaya menekan inflasi.

"Kemarin kita terlambat menaikkan suku bunga acuan BI sehingga *capital outflow* sudah terjadi. Obligasi pemerintah yang tadinya didominasi investor asing dengan sumbangan hingga 35% saat ini menjadi hanya 14%," katanya.

Di diskusi yang sama, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Made Arya Wijaya menyebut pemerintah akan mendorong penciptaan sum-

ber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia dalam jangka menengah.

Selain itu, lanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang baru juga akan diciptakan dengan melakukan transisi ke ekonomi hijau, memanfaatkan digitalisasi ekonomi, dan melakukan reformasi untuk sektor keuangan.

Ia mengatakan, pada 2023 pemerintah tetap optimistis perekonomian akan tumbuh sekitar 4,7% sampai 5,3% secara tahunan, tetapi dampak pelemahan ekonomi global juga akan terus diwaspadai.

Proyeksi pertumbuhan

Grup Ekonomi Bank DBS mematok pertumbuhan 2023 Indonesia sebesar 5%, turun dari 5,4% pada 2022. Faktor penyebabnya antara lain

kenaikan tajam harga BBM bersubsidi yang membuat inflasi utama melampaui target inflasi (sebesar 2%-4% pada paruh kedua 2022).

Ekonom Senior DBS Radhika Rao mengatakan, untuk paruh pertama 2023, DBS Group Research memperkirakan angka pertumbuhan lebih tinggi dan paruh kedua akan menurun karena unsur dasar dan imbas dampak tidak langsung yang bersifat ringan. BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga untuk terakhir kali menjadi 5,75% serta mendukung nilai tukar mata uang.

"Perekonomian Indonesia akan mendapat manfaat dari pertemuan berbagai katalis menguntungkan, termasuk pembukaan kembali sektor jasa, persyaratan perdagangan komoditas menguntungkan, stabilitas eksternal, dan inflasi terkendali, kecuali lonjakan di sisi penawaran akibat kenaikan harga bahan bakar pada 2022," papar Radhika.

Namun, sambungannya, permintaan diperkirakan akan kembali normal mengingat faktor pendorong positif itu akan sirna pada tahun depan. (Ant/E-2)

BI Siapkan Transformasi UMKM Hijau

DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan pihaknya tengah mendorong transformasi UMKM untuk melakukan model bisnis hijau. Langkah itu sebagai upaya untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat atas produk ramah lingkungan.

"Hal ini semakin memberikan kesadaran kepada para pelaku usaha untuk melakukan *shifting ke green business* untuk menangkap peluang usaha tersebut," ungkapnya dalam Seminar Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau secara virtual, kemarin.

BI, sambungannya, akan mengeluarkan kebijakan yang mendukung pembiayaan yang berwawasan lingkungan (*green financing*) melalui penerbitan peraturan *ratio green loan to value* dan *financing to value, green ratio*, rasio pembiayaan inklusi makroprudensial, termasuk rencana penyiapan kalkulator karbon yang akan disesuaikan dengan aturan internasional.

"Dari sini diharapkan terbentuk sinergi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memberi insentif dan kemudahan bagi masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya dalam menghitung emisi karbon yang dihasilkan," ucap Doni.

Dari sisi kelembagaan, BI

berupaya dan berproses untuk melanjutkan transformasi dari aspek tata kelola, manajemen risiko, strategi, serta *performance* dari indikator hijau.

"Implementasi dari UMKM hijau kami tetap mengacu pada 3 pilar kami, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas dan pembiayaan. Tentunya pengembangan UMKM hijau merupakan salah satu implementasi dari *framework* kebijakan ekonomi dan keuangan hijau BI," kata Doni.

Di seminar yang sama, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmi Sari mengatakan, pihaknya sedang menyusun kajian untuk mengidentifikasi potensi pengembangan UMKM yang terpengaruh oleh dinamika perekonomian, baik global maupun domestik. Kajian juga dibuat untuk merumuskan strategi yang tepat dalam rangka mengoptimalkan pengembangan UMKM.

"UMKM harus menjawab tantangan dampak perubahan iklim tersebut sekaligus adanya tuntutan semakin meningkatnya persyaratan kesadaran akan aspek lingkungan," ungkapnya.

Kajian meliputi definisi, kriteria, dan indikator UMKM hijau yang sesuai dengan *international best practice*. (Des/E-2)

SKK Migas Jamin Pasokan Gas untuk Industri Pupuk

SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjamin keandalan pasokan gas untuk kebutuhan industri pupuk di Indonesia pada 2023.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan kemampuan pasokan gas tahun depan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini karena proyek strategis nasional,

Jambaran Tiung Biru, yang dioperasikan Pertamina Cepu di Bojonegoro dan proyek MBA-MDH yang dioperasikan HCML di Madura sudah *onstream*.

"Sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, kami memastikan pasokan gas untuk domestik pada 2023 akan terpenuhi dan mendapatkan prioritas," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Pada 2003 realisasi penyediaan gas untuk domestik sebesar 25%. Namun, pada 2021 angkanya telah meningkat menjadi 64% dan tahun ini sudah mencapai 69%.

Kurnia menjelaskan posisi pasokan gas untuk Pupuk Sridwidjaja (Pusri) Palembang

dengan kebutuhan gas 190 MMSCFD dan Pupuk Kujang Cikampek dengan kebutuhan sebanyak 101 MMSCFD statusnya kini sudah terpenuhi.

Selanjutnya, kebutuhan gas Petrokimia Gresik sebesar 141 MMSCFD, Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 335 MMSCFD, dan Pupuk Iskandar Muda (PIM) 2 dengan kebutuhan 50 MMSCF statusnya juga sudah terpenuhi.

Secara terpisah, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memastikan bahwa produksi dan distribusi pupuk aman untuk periode Musim Tanam Pertama 2023 (Maret-April 2023). Per 26 November 2022, sebanyak 108.917 ton stok pupuk urea bersubsidi dan 6.725 ton NPK formula khusus, 158.702 ton pupuk urea nonsubsidi serta 38.073 NPK nonsubsidi telah tersedia di gudang-gudang PKT yang tersebar di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Sepanjang 1 Januari-31 Oktober 2022, PKT telah memproduksi pupuk urea 92% dari target 3,42 juta ton, NPK mencapai 102% dari target 250 ribu ton, ammonia sebesar 101% dari target 2,79 juta ton. (Des/Ant/E-3)

KUHP tidak Bebani Sektor Pariwisata dan Investasi

SEKTOR pariwisata dan investasi di Indonesia diyakini tidak akan terdampak oleh KUHP yang baru disahkan. KUHP tersebut menuai banyak protes sebab salah satunya terkait pasal perzinahan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II atau mencapai Rp10 juta.

Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries, menjelaskan pasal perzinahan di KUHP tersebut merupakan delik aduan absolut. "Pasal perzinahan dalam KUHP baru yang berlaku 3 tahun kemudian ialah delik aduan absolut. Artinya, hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan), atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan," jelas Albert, kemarin.

Dia menegaskan klarifikasi ini perlu diberikan menyusul maraknya pemberitaan yang menyesatkan dan keliru secara fundamental, terkait pasal perzinahan yang dinilai membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.

Albert melanjutkan KUHP baru juga tidak pernah memberikan syarat administrasi

kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menanyakan status perkawinan siapa pun. Dengan demikian, para investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia.

"Karena ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang, tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan," ungkapnya.

Optimisme senada diungkapkan Direktur Utama In-Journey, BUMN holding industri aviasi dan pariwisata, Dony Oskaria. Dia meyakini aturan itu tidak berdampak pada penurunan atau pembatalan penerbangan internasional ke Indonesia, termasuk dari negara tetangga Australia meski pemerintah sempat telah merilis kebijakan *travel warning*.

"Saya tidak ahli di dalam undang-undang, tapi melihat dari data saja, arus turis mancanegara di kedatangan internasional bandara di Indonesia tidak terjadi penurunan, tidak ada juga pembatalan," kata Dony di Kementerian BUMN Jakarta, kemarin. (Tri/Ant/E-3)



KONTRIBUSI SYNTHESIS HUIS: Managing Director Synthesis Huis Aldo memberikan materi terkait arsitektur dan dunia properti saat kuliah umum di Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/12). Manajemen Synthesis Huis berbagi informasi tentang konsep desain hunian kepada mahasiswa arsitek Unkris.



PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.
(“Perseroan”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/4 Januari 2023
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : Ruang Rapat Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Boulevard Timur - Jakarta Selatan 12940

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Terkait Penyesuaian Pasal 3 Tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 16.00 WIB; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.
c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir serta susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkini (termasuk fotokopi Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Anggaran Dasar yang akan diserahkan kepada Perseroan).
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa seperti ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dimiliki selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara; Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili atau terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilgalisasi oleh Notaris Publik setempat dan dilgalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76 - 78, Jakarta Selatan, 12910;
c. Surat Kuasa tersebut di atas dengan dilampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau 26 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 04 Januari 2023 dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Desember 2022
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi